



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARMI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 462848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 670.134.480

1. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 283.068.000
2. Tanah Seluas 2999 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 2.723.190
3. Tanah Seluas 2656 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 2.416.960
4. Tanah Seluas 2963 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 2.696.330
5. Tanah Seluas 2547 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 229.230.000
6. Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.500.000

1. MOBIL, INNOVA G MINIBUS PENUMPANG Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA 2 SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA 2 SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.750.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	647.877.421
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.608.261.901
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.608.261.901

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.